

ABSTRAK

Latar belakang penulisan disertasi ini yaitu dilandasi adanya Surat Keterangan Waris (SKW) yang membedakan Warga Negara Indonesia sebagai penduduk asli dengan warga keturunan, aturan-aturan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara konstitusional, ketentuan pasal 26 ayat 1 UUD NKRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa semua Warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, sebagaimana dijelaskan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 D ayat 1 Amandemen Kedua UUD NKRI Tahun 1945. terkait dengan konteks kebijakan pembuatan SKW di Indonesia, dapat disimpulkan sementara, bahwa klasifikasi Warga Negara Indonesia yang terbagi menjadi Warga Negara penduduk asli dan warga keturunan, adalah salah satu bentuk yang menyangkal dan bertentangan dengan konstitusi negara untuk posisi yang setara dalam hukum terhadap warga negara, sehingga berpotensi menyebabkan perpecahan atau pengelompokan orang berdasarkan ras.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Benarkah kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat SKW belum berbasis nilai keadilan? 2) Bagaimana hambatan-hambatan tugas dan kewenangan lembaga pembuat SKW saat ini? 3) Bagaimana rekonstruksi kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat SKW berbasis nilai keadilan?

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah *socio legal* dengan tradisi penelitian kualitatif, dengan menggunakan paradigma *constructivism*. Pembahasan dilakukan secara *komprehensif* dengan menggunakan pendekatan hukum progresif pada pencapaian keadilan sosial.

Hasil penelitian, **jawaban 1: --Pasal 40** Instruksi Balai-balai Harta Peninggalan di Indonesia Stbl. 1872 Nomor 166. **--Pasal 42** ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto ketentuan **--Pasal 111** ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 masih terjadi penggolongan penduduk (mensyaratkan SKW dari Lurah & Camat untuk warga penduduk asli, BHP khusus untuk warga timur asing non tionghoa, dan Notaris untuk warga keturunan tionghoa) sehingga bertentangan dengan nilai keadilan Pancasila. **Jawaban ke 2: --Pasal 163** ayat (4) I.S, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan; mempertegas penghapusan keberlakuan penggolongan penduduk berdasarkan Staatsblad (STB 1917:129, STB 1924:556 dan STB 1917:12). Namun secara existing masih menjadi dasar penetapan SKW pada birokrasi pertanahan sehingga aturan tersebut justru menjadi hambatan secara kelembagaan. Dengan penghapusan **--Pasal 163** I.S, pada faktanya menjadi hambatan karena masih memberi kewenangan pada Notaris dalam pembuatan akta Keterangan Hak Waris dan pembagian hak waris, hal itu menimbulkan kerancuan dan pembiasan tugas dan kewenangan lembaga pembuat SKW. **Jawaban ke 3:** Perlu rekonstruksi terhadap ketentuan tersebut pada kajian pertama dan kedua, selebihnya Rekonstruksi Kebijakan Lembaga SKW yang terintegrasi dalam model konsep pelayanan *One Map Policy* (satu pintu kelembagaan yaitu Pengadilan: Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Masyarakat Hukum Adat).

Rekomendasi: diperlukan *Rule Breaking* (pencabutan peraturan yang sudah tidak relevan serta menimbulkan penyimpangan terhadap UUD NKRI 1945), dan perlu penegasan berlakunya Asas Integrasi Kelembagaan oleh *The Making Institutions*.

Kata Kunci: Kebijakan, Kelembagaan, Hak Waris, dan Surat Keterangan Hak Waris.

ABSTRACT

The background of the writing of this dissertation is the validity of the Certificate of Inheritance which distinguishes Indonesian citizens as indigenous people from citizens of descent. These rules are not in accordance with the values of Pancasila. Constitutionally, the provision of article 26 paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia explains that all Indonesian citizens have the same position in law and government, as explained in accordance with article 27 paragraph 1 and article 28 D paragraph 1 of the Second Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It is associated with the policy context of making a Certificate of Inheritance in Indonesia, it can be concluded temporarily, that the classification of Indonesian Citizens which are divided as indigenous citizens or native citizens and citizens of descent, is one form that denies and contradicts the state constitution for equal position in law against citizens, so that the potential to cause division or grouping of people based on race.

The problems in this study are 1) Is it true that the policy of the duties and authority of the institution making the Certificate of Inheritance has not been based on the value of justice? 2) What are the current constraints on the duties and authority of the institution making the Certificate of Waris today? 3) How is the reconstruction of the policy on the duties and authority of the institution making the inheritance certificate based on justice value?

The approach method in this research is socio legal with the tradition of qualitative research, using the constructivism paradigm. The discussion is carried out comprehensively using a progressive legal approach to achieving social justice.

Research result, **answer 1:** - Article 40 Instruction of Indonesian Heritage Property Stbl. 1872 Number 166. - Article 42 paragraph (1) Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land

Registration in conjunction with the provisions of Article 111 paragraph (1) letter c Regulation of the

Head of the National Land Agency No. 8 of 2012 there is still a classification of the population (requires SKHW from the Lurah & Camat for native residents, BHP specifically for foreign eastern citizens, and Notaries for residents of descendants of Chinese or eastern foreigners) so that it conflicts with the values of Pancasila justice.

Answer 2: - Article 163 paragraph (4) I.S, Act Number 24 of 2013 concerning Population Administration; reinforce the elimination of the classification of the population based on the Staatsblad (STB 1917: 129, STB 1924: 556 and STB 1917: 12). However, the existing is still the basis for the establishment of SKHW in the land bureaucracy so that the regulation actually becomes an institutional obstacle. With the abolition of - Article 163 I.S (Indische Staats Regeling), in fact becomes an obstacle because it still grants notary authority in making SKHW and the distribution of inheritance rights, it creates confusion and refraction from the authority to SKHW. **Answer 3:** It is necessary to reconstruct these provisions in the first and second studies, the rest is the Reconstruction of SKHW Institution Policy which is integrated in the One Map Policy service concept model (one institutional door, namely the Court: PA & PN and MHA).

Recommendation: Rule Breacking is needed (repeal of regulations that are already out of touch and cause irregularities to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia), and it is necessary to confirm the implementation of the Institutional Integration Principle by The Making Institutions.

Keywords: Policy, Institutional, Inheritance Rights, and Certificate of Inheritance Rights.